

melaporkan transaksi.

2) Peraturan;

Peraturan yang dibuat pemerintah terkadang berdampak pada naiknya biaya operasi di beberapa kegiatan atau bahkan membuat tidak mungkin atau sulit untuk beroperasi secara legal di dalamnya. Akibatnya, banyak kegiatan mengarah pada *underground* sebagian untuk menghindari kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan sebagian lagi untuk menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki terlalu banyak peraturan yang kaku yang diatur secara berlebihan akan cenderung memiliki ekonomi bayangan yang lebih besar.

3) Larangan;

Larangan adalah bentuk peraturan yang khusus sehingga dapat juga diklasifikasikan bersama dengan kategori peraturan. Larangan tersebut memainkan atau dapat memainkan peran penting dalam mendorong orang dan sumber daya keluar dari jalur ekonomi resmi. Ada beberapa kegiatan yang dilarang sehingga individu yang melakukannya terlibat dalam kegiatan ilegal atau bahkan kriminal. Kegiatan tersebut dilakukan karena seringkali hasil dari operasi ini sangat diminati sehingga keuntungan yang tinggi dapat diperoleh dengan beroperasi di dalamnya. Bentuk utama dari kegiatan ini adalah produksi dan distribusi obat-obatan terlarang, terlibat dalam perjudian ilegal, peminjaman uang dengan bunga tinggi, produksi dan penjualan zat berbahaya atau terlarang (senjata, zat biologis terlarang, dan lain-lain), berbagai layanan, termasuk prostitusi, dan lain-lain.

#### 4) Korupsi

Bidang bermasalah lainnya adalah korupsi. Korupsi dapat bersifat politis atau birokratis dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan korupsi. Ini juga dapat mendistorsi beberapa harga seperti misalnya investasi publik ketika mereka memasukkan pembayaran suap kepada beberapa pejabat publik. Sekali lagi pertanyaan dapat diajukan tentang apakah hasil dari korupsi harus dipertimbangkan dalam perkiraan *underground economy* atau *shadow economy*. Di beberapa negara hasil ini bisa sangat besar dan korupsi dapat mengubah beberapa harga resmi barang yang dijual di pasar. Sedangkan menurut Erdinc (2016), penyebab utama di balik keberadaan *undergroun economy* sebagai berikut:

- 1) Penyebab ekonomi (distribusi pendapatan yang tidak adil, inflasi, sistem pajak, pengangguran)
- 2) Penyebab fiskal (tarif pajak yang tinggi, kekurangan dalam audit, layanan akuntansi yang tidak memadai)
- 3) Penyebab hukum (hukum yang rumit dan tidak jelas, peraturan yang sering berubah, degenerasi struktur kesatuan)
- 4) Penyebab administratif (organisasi otoritas pajak, struktur teknis, profil personel dan mekanisme audit)
- 5) Penyebab sosial dan psikologis (etika pajak, psikologi wajib pajak, dan penyebab historis)
- 6) Penyebab politik

### c. Dampak *Underground Economy*

Menurut Erdinc (2016) *underground economy* memiliki dampak negatif dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi. Dengan adanya *underground economy* yang besar maka agregat makro ekonomi yang diukur, seperti tingkat pengangguran atau tingkat pendapatan, menjadi tidak dapat diandalkan. Akibatnya kebijakan ekonomi yang didasarkan pada data tersebut kemungkinan besar tidak efektif.

Pada sisi ekonomi mikro, kegiatan *underground economy* memiliki keunggulan signifikan atas perusahaan resmi dan menciptakan kondisi persaingan yang tidak adil. Pelaku ekonomi yang beroperasi di ekonomi resmi membayar pajak sementara yang beroperasi di *underground economy* tidak membayar pajak (Tanzi 2002) sehingga perusahaan yang beroperasi di *underground economy* dapat meningkatkan volume penjualan dan tingkat keuntungan mereka dengan menyediakan produk dan layanan mereka dengan harga yang lebih rendah dari pasar umum.

Lembaga jaminan sosial juga terpengaruh oleh *underground economy* dan mungkin mengalami situasi keuangan yang memburuk. Perusahaan yang beroperasi di *underground economy* mengurangi pendapatan pajak dan tidak berkontribusi pada distribusi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Menyusul penurunan distribusi kesejahteraan, masyarakat mungkin mengalami peningkatan ketegangan sosial karena individu berpenghasilan rendah akan mengalami penurunan standar hidup. Namun demikian terdapat dampak positif dari *underground economy* dimana perusahaan yang beroperasi dalam *underground economy* memiliki biaya

produksi yang lebih rendah, sehingga ada peningkatan permintaan tenaga kerja jika dibandingkan dengan ekonomi terdaftar. Sebagai akibat dari peningkatan lapangan kerja ini, ketergantungan pada kesejahteraan sosial akan berkurang. Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi bawah tanah dapat menyediakan barang dan jasa mereka dengan biaya lebih rendah. Hal ini memungkinkan anggota masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses barang dan jasa yang sebelumnya tidak dapat diakses (Erdinc, 2016).

#### **d. Pengukuran *Underground Economy***

Meski isu *undeground economy* telah lama diselidiki, pembahasan mengenai metodologi yang “tepat” untuk menilai ruang lingkungannya belum juga berakhir. Schneider (2014) mengenalkan ada tiga metode kelompok penilaian yaitu:

- 1) Prosedur langsung menggunakan tingkat mikro dan bertujuan untuk menentukan ukuran *undeground economy*. Contoh dari metode ini adalah survei.
- 2) Prosedur tidak langsung yang menggunakan indikator makroekonomi yang menggambarkan perkembangan *undeground economy* dari waktu ke waktu.
- 3) Model statistik yang menggunakan alat statistik untuk memperkirakan ekonomi bayangan sebagai variabel "tidak teramati" atau "laten"; misalnya Metode MIMIC (*Multiple Indicator, Multiple Causes*).

Salah satu dari tiga kelompok tersebut, pendekatan yang banyak digunakan adalah pendekatan moneter (Tanzi, 2002) yang dilakukan dengan menganalisis permintaan uang kartal terhadap adanya factor pendorong munculnya *undeground economy* diantaranya inflasi, beban pajak, suku bunga deposito, dan PDB. Asumsi

dari pendekatan ini menyatakan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*) timbul karena para pelaku ekonomi ini menginginkan penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya sebagai kewajiban mereka, karena menjadi beban bagi para pelaku *underground economy*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Nizar dan Purnomo (2011) bertujuan untuk mengetahui dan menentukan besarnya nilai kegiatan *underground economy* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan kegiatan *underground economy* mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan nilai rata-rata mencapai Rp164,4 triliun pertahun atau sekitar 6% dari nilai PDB. Besarnya nilai kegiatan *underground economy* direpresentasikan oleh tingginya permintaan uang kartal yang dipengaruhi oleh beban pajak. *Underground economy* bersifat elastis terhadap perubahan tarif pajak.

Samuda (2016) menganalisis serta menghitung besaran *underground economy* di Indonesia menggunakan pendekatan moneter seperti yang diperkenalkan oleh Tanzi (1983). Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian yaitu: permintaan uang kartal, inflasi, beban pajak, suku bunga deposito 1 bulan, dan PDB. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pendekatan moneter dapat dilakukan untuk mengestimasi besarnya *underground economy* di Indonesia, lalu penggunaan uang kartal dapat membuat aktivitas *underground economy*.

Medina dan Schneider (2018) menganalisis *underground economy* di 158 negara pada tahun 1991-2015 menggunakan metode *Multiple Indicator-Multiple*

*Causes (MIMIC)*. Hasilnya penghitungan menggunakan metode *MIMIC* sebanding dengan penelitian Schneider *et.al* (2010), Hasan dan Schneider (2016) dan penelitian lainnya, dan secara keseluruhan aktivitas *underground economy* dari tahun 1991-2015 mengalami penurunan tapi pada tahun 2008 akibat krisis terjadi peningkatan aktivitas *underground economy*.

